

Analisis Implementasi Akuntansi Lingkungan Dalam Menilai Kinerja Lingkungan Berdasarkan Psak Nomor 32 Dan 33 Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar

Nurfadila ¹⁾

Email: nurfadila.nurfadila@umi.ac.id

¹ Dosen Prodi Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia

(Diterima: 11 Maret 2019; di revisi: 25 Maret 2019; dipublikasikan: 10 April 2019)



©2019 –Bongaya Journal for Research Accounting STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi lingkungan dalam menilai kinerja lingkungan dan ketentuan mengenai PSAK Nomor 32 dan 33 dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis yang berdasarkan pembahasan dan teknik yang mengungkapkan konsep teoritis dan gambaran mengenai objek penelitian serta penyajian dari hasil penelitian. Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah menerapkan akuntansi lingkungan dan berperan dalam peningkatan kinerja lingkungan perusahaan serta mengungkapkannya pada pencatatan dalam laporan keuangan perusahaan telah mengacu pada PSAK Nomor 32 dan 33.

Kata kunci: Akuntansi lingkungan, kinerja lingkungan, PSAK Nomor 32 dan 33.

PENDAHULUAN

Lingkungan merupakan bagian dari kualitas kehidupan dan tidaklah dapat dipungkiri jika saat ini masalah lingkungan semakin sering menjadi perdebatan baik ditingkat regional, nasional maupun internasional.

Permasalahan lingkungan di Indonesia merupakan faktor penting yang harus segera di pikirkan mengingat akibat dampak buruk pengelolaan lingkungan dan rendahnya perhatian terhadap lingkungan dari aktivitas industri yang terjadi dewasa ini. Gejala ini dapat dilihat dari berbagai bencana yang terjadi akhir-akhir ini, seperti banjir bandang di Jawa Tengah dan Jawa Timur, tanah longsor, munculnya banjir lumpur bercampur gas sulfur di daerah Sidoarjo

Jawa Timur, serta kebakaran hutan di beberapa hutan lindung di Sumatera dan Kalimantan.

Kasus yang terakhir berkembang yaitu dengan adanya kebakaran hutan lindung di daerah Sumatera dan Kalimantan, dampak yang ditimbulkan kebakaran hutan ini ternyata sangat kompleks. Kebakaran hutan tidak hanya berdampak terhadap ekologi dan mengakibatkan kerusakan lingkungan saja. Namun dampak dari kebakaran hutan ternyata mencakup bidang-bidang lain, yaitu dampak terhadap Sosial, Budaya, dan Ekonomi (Alamendah, 2011).

Lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan memengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia,” Emil Salim, Menteri Lingkungan Hidup RI tahun 1973-1993.

Lingkungan hidup dapat memengaruhi kehidupan manusia karena memiliki daya dukung. Manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan daya dukung lingkungan hidup. Definisi daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain (UU Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat 5). Karena lingkungan hidup Indonesia menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia, maka pemerintah harus melaksanakan tindakan Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (UU Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 13 Ayat 1 dan Ayat 3).

Perusahaan didirikan dengan tujuan menghasilkan laba maksimal bagi para pemilik perusahaan. Cost-benefit suatu aktivitas operasi perusahaan menjadi pertimbangan utama dalam usaha memaksimalkan laba. Atas dasar alasan ini pula kemudian terjadi pengabaian prinsip-prinsip dari maksimalisasi laba itu sendiri, diantaranya pengabaian aspek-aspek hubungan kemanusiaan dengan tenaga kerja, lingkungan alam, dan masyarakat sekitar, sedangkan aspek-aspek tersebut sangat berpengaruh terhadap kondisi going concern perusahaan secara langsung atau tidak langsung. Dengan kata lain jika terjadi hal-hal yang mengancam kontinuitas perusahaan, maka jalan keluarnya mengandung cost yang relatif lebih tinggi (Ja'far dan Amalia, 2006).

Menurut Burhani, (2014), salah satu faktor yang dapat membantu peningkatan kinerja lingkungan adalah akuntansi lingkungan. Peran akuntansi lingkungan dalam meningkatkan kinerja lingkungan merujuk

pada salah satu peran akuntansi yaitu sebagai penyedia informasi bagi manajemen. Selain kepada pihak internal, akuntansi lingkungan juga menyajikan informasi lingkungan kepada pihak eksternal. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Imanina Burhany menunjukkan bahwa (1) implementasi akuntansi lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja lingkungan dan (2) implementasi akuntansi lingkungan dan kinerja lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan informasi lingkungan, baik secara simultan maupun parsial. Hasil ini menimbulkan implikasi terhadap perlunya praktik akuntansi perusahaan di perluas dengan memasukkan aspek lingkungan. Dengan demikian akuntansi dapat berkontribusi dalam pertanggungjawaban lingkungan perusahaan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada lokasi dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Konsep akuntansi lingkungan sebenarnya sudah mulai berkembang sejak tahun 1970-an di Eropa. Akibat tekanan lembaga-lembaga bukan pemerintah dan meningkatnya kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat yang mendesak agar perusahaan-perusahaan menerapkan pengelolaan lingkungan tidak hanya kegiatan industri demi bisnis semata (Tony Djogo, 2006). Corporate Social Responsibility sebagai konsep akuntansi yang baru adalah transparansi pengungkapan sosial atas kegiatan atau aktivitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan, dimana transparansi yang diungkapkan tidak hanya informasi keuangan perusahaan tetapi juga diharapkan

mengungkapkan informasi mengenai dampak sosial dan lingkungan hidup yang diakibatkan aktivitas perusahaan.

Di Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menyusun suatu standar pengungkapan akuntansi lingkungan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 32 dan 33. kedua PSAK ini mengatur tentang kewajiban perusahaan dari sektor pertambangan umum dan pemilik Hak Pengusahaan Hutan (HPH) untuk melaporkan item-item lingkungan dalam laporan keuangan (Lindrianasari, 2007:161).Permasalahan lingkungan juga semakin menjadi perhatian khusus dan serius, baik oleh konsumen, investor maupun pemerintah. Investor asing lebih cenderung memperhatikan masalah pengadaan bahan baku dan proses produksi yang terhindar dari munculnya permasalahan lingkungan, seperti kerusakan tanah, rusaknya ekosistem, polusi air, polusi udara dan polusi udara (Putra, 2008).

Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan oleh operasi perusahaan adalah limbah produksi. Dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Limbah diartikan sebagai sisa suatu usaha dan atau kegiatan produksi, sedangkan pencemaran diartikan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan / atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Limbah yang dihasilkan dari operasional perusahaan memiliki kemungkinan bahwa limbah tersebut berbahaya bagi

lingkungan sehingga limbah tersebut memerlukan pengelolaan dan penanganan yang khusus oleh perusahaan agar tidak menyebabkan dampak negatif yang lebih besar terhadap lingkungan tempat perusahaan beroperasi.

Akuntansi lingkungan merupakan bidang ilmu akuntansi yang berfungsi untuk mengidentifikasi, mengakui, mengukur, menilai, menyajikan dan mengungkapkan akuntansi lingkungan. Dalam hal ini pencemaran dan limbah produksi merupakan salah satu contoh dampak negatif dari operasional perusahaan yang membutuhkan sistem akuntansi lingkungan sebagai pengendali terhadap pertanggungjawaban perusahaan.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu unit usaha milik daerah, yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. Tugas pokok Perusahaan Daerah Air Minum, adalah menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesejahteraan dan pelayanan umum yang diawasi dan dimonitor oleh aparat aparat eksekutif maupun legislatif daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi lingkungan dalam menilai kinerja lingkungan dan ketentuan mengenai PSAK Nomor 32 dan 33 dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar.

METODE PENELITIAN

Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif naratif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menyusun, dan menginterpretasikan sehingga diperoleh hasil berupa gambaran yang jelas tentang akuntansi lingkungan, kinerja lingkungan, dan pengungkapan informasi lingkungan yang mendukung perusahaan agar tetap berkelanjutan. Penelitian ini dilaksanakan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar yang berlokasi di Jalan Dokter Ratulangi No. 3 Adapun waktu penelitian digunakan selama kurang lebih dua bulan yaitu pada bulan Januari 2016 sampai bulan Februari 2016. Data yang diperoleh secara langsung terhadap obyek yang diteliti yaitu dari hasil wawancara.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian lapangan yaitu dengan pengamatan/observasi, dokumentasi, wawancara, serta penelitian kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif naratif. Menurut Ghony & Fauzan Almanshur (2012), deskriptif naratif adalah analisis data yang berusaha mengungkap masalah yang dihadapi dengan menggambarkan setiap aspek sebagaimana adanya dengan menghimpun data yang berhubungan dengannya tanpa memberikan interpretasi dengan menggunakan logika ilmiah.

Metode Analisis

Adapun kajian-kajian yang akan di lakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan dan menganalisa data yang telah diperoleh yaitu dari proses produksi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dengan cara membandingkan antara data hasil wawancara dengan data dokumentasi perusahaan yang berupa data laporan keuangan perusahaan. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, maupun analisis dokumen (dokumen laporan

keuangan) diverifikasi melalui perbandingan antara data yang diperoleh dengan metode-metode tersebut. Tujuan dilakukan langkah ini adalah untuk mengetahui dan memastikan apa saja biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dan bagaimana perlakuan akuntansi atas biaya tersebut pada laporan keuangan perusahaan.

2. Pada kinerja lingkungan penelitian ini akan melihat tindakan perusahaan dalam meningkatkan kinerja lingkungan.
3. Hasil dari analisa tersebut selanjutnya akan diperbandingkan dengan teori dan konsep serta dibandingkan dengan PSAK yang ada dan mendukung. Tujuan dilakukan langkah ini adalah untuk mengetahui kesesuaian atau tidak antara teori yang berkembang secara umum dengan praktek yang terjadi di perusahaan.
4. Memberikan kesimpulan atas hasil pembahasan. Apabila hasil analisa masih banyak perbedaan-perbedaan dengan teori dan konsep yang ada dan PSAK yang mendukung, maka peneliti akan memberikan saran atau masukan yang diperlukan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi serta wawancara ke beberapa pegawai PDAM Kota Makassar. Perusahaan daerah air minum (PDAM) kota makassar merupakan salah satu unit usaha milik daerah, yang bergerak dalam pelayanan umum/jasa kepada masyarakat dalam penyediaan air bersih.

Kegiatan Produksi

PDAM Kota Makassar menggunakan dua jenis bahan yaitu bahan baku dan bahan pembantu. Sekitar 95% bahan baku yang diolah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar berasal dari beberapa sungai dan bendungan yang ada di Kota Makassar. Adapun bahan penolong yang digunakan dalam pengolahan air bersih PDAM Kota Makassar

yaitu Aluminium Sulfat dan Polyaluminium Chloride (PAC).

Ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan ibu Uly selaku staf laboratorium :

“Dalam pengolahan air bersih PDAM Kota Makassar kita hanya menggunakan dua bahan kimia sebagai bahan penolong, yaitu Aluminium Sulfat dan PAC”

Pada umumnya bahan seperti Aluminium sulfat $[Al_2(SO_4)_3 \cdot 18H_2O]$ atau sering disebut alum atau tawas, Poly Aluminium Chlorida (PAC) dapat digunakan sebagai koagulan. Untuk menentukan dosis yang optimal, koagulan yang sesuai dan pH yang akan digunakan dalam proses penjernihan air, secara sederhana dapat dilakukan dalam laboratorium dengan menggunakan tes yang sederhana (Alearts & Santika, 1984). Prinsip penjernihan air adalah dengan menggunakan stabilitas partikel-partikel bahan pencemar dalam bentuk koloid.

Proses Produksi

Proses Produksi merupakan proses pengolahan air baku sampai menjadi air bersih. Proses produksi yang dijalankan adalah proses secara terus menerus yang berarti pembuatannya berurutan, dimana aliran bahan baku selalu tetap atau mempunyai pola yang selalu sama sampai menjadi produk akhir.

PDAM biasanya melakukan pengolahan secara fisika dan kimiawi dalam proses penyediaan air bersih. Adapun proses pengolahan air bersih pada perusahaan daerah (PDAM) kota Makassar yaitu:

Pengolahan air baku

Bangunan intake ini berfungsi sebagai bangunan pertama untuk masuknya air dari sumber airbaku. Pada umumnya, sumber air untuk pengolahan air bersih pada PDAM Kota Makassar diambil dari sungai jeneberang dan

sungai lekopancing . Pada bangunan intake ini biasanya terdapat bar screen yang berfungsi untuk menyaring benda-benda yang ikut tergenang dalam air. Selanjutnya, air akan masuk ke dalam sebuah bak yang nantinya akan dipompa ke bangunan selanjutnya, yaitu WTP (Water Treatment Plant).

Penambahan bahan kimiawi

Penambahan bahan kimiawi atau koagulasi yaitu proses pencampuran bahan kimia (koagulan) dengan air baku sehingga membentuk campuran yang homogen dengan disertai pengadukan cepat. Tipe koagulator terdiri dari tipe hidrolis dan tipe mekanis. Koagulan yang digunakan antara lain Aluminium Sulfat dan Polyaluminium Chloride (PAC). Waktu pengadukan 30-120 detik.

Proses Pengadukan

Pengadukan atau flokulasi yaitu proses pembentukan partikel flok yang besar dan padat dengan cara pengadukan lambat agar dapat diendapkan . tipe flokulator terdiri dari tipe hidrolis, mekanis, dan clarifier. Waktu kontak berkisar 20-100 menit.

Proses Pemisahan

Proses pemisahan atau sedimentasi yaitu proses pemisahan padatan dan air berdasarkan perbedaan berat jenis dengan cara pengendapan. Tipe bak sedimentasi terdiri dari bak persegi (aliran horizontal), bak persegi aliran vertikal (menggunakan pelat/tabung pengendap), bak bundar (aliran vertikal-radial dan kontak padatan), serta tipe clarifier. Kedalam bak berkisar antara 3-6 meter (bak persegi dan bak bundar) serta 0,5-1 meter (clarifier). Waktu retensi 1-3 jam (untuk tipe bak persegi horizontal dan bak bundar), 0,07 jam (waktu retensi pada pelat/tabung pengendap), dan 2-2,5 jam (tipe clarifier).

Proses Penyaringan

Penyaringan atau filtrasi yaitu proses pemisahan padatan dari air melalui media penyaring seperti pasir dan antrasit. Jenis saringan terdiri dari saringan biasa (gravitasi), saringan dengan pencucian antar saringan, dan saringan bertekanan. Kecepatan penyaringan 6-11 m/jam (saringan biasa dan saringan dengan pencucian antar saringan) dan 12-33 m/jam (saringan bertekanan).

Proses Desinfeksi

Desinfeksi yaitu proses pembubuhan bahan kimia untuk mengurangi zat organik pada air baku dan mematikan kuman/organisme. Desinfektan yang digunakan antara lain gas klor dan kaporit.

Distribusi (penyaluran ke customer)

Limbah Produksi Yang dihasilkan

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar merupakan perusahaan milik pemerintah yang bergerak sebagai penyedia pelayanan umum/jasa kepada masyarakat dalam penyediaan air bersih yang memiliki kepedulian lingkungan dan selalu berusaha memenuhi standar yang berlaku untuk mengantisipasi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh operasional perusahaan.

Dalam proses produksi air bersih tersebut menghasilkan limbah lumpur. Kandungan dalam lumpur tersebut terdeteksi mengandung aluminium akibat dari penggunaan aluminium sulfat/tawas pada proses pengolahan air bersih. Adanya kandungan logam aluminium di dalam lumpur ini tergolong sebagai limbah bahan berbahaya beracun sehingga diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Adapun pengelolaan limbah pada PDAM yaitu sesuai dengan yang diungkapkan oleh ibu Aswariani selaku staf produksi:

“Pada PDAM Kota Makassar itu ada kegiatan rutin yang berupa pengurasan lumpur yang dilakukan 3 (tiga) kali dalam

setahun dan dibuang ke bak penampungan yang di sediakan oleh PDAM Kota Makassar sehingga tidak mengalir ke lingkungan penduduk, dan lumpur yang sudah lama mengendap akan menjadi tanah subur dan dimanfaatkan oleh karyawan-karyawan untuk membuat kebun dan sebagai bahan campuran pembuatan batako dan dari alirannya itu misalnya air yang merupakan sisa dari sedimen itu otomatis mengalir ke selokan dan kita jamin tidak ada yang mengotori selokan”.

Dalam proses pengolahan limbah tersebut PDAM Kota Makassar membentuk bagian pengolahan lumpur sebagai bagian dari struktur organisasi di lingkungan PDAM yang bertugas mengolah pembuangan lumpur, menjadwalkan pembuangan lumpur dengan mempertimbangkan kondisi pasang dan surut, serta memanfaatkan lumpur PDAM sebagai tawas cair dan bahan campuran pembuatan batako, sehingga tidak ada limbah yang berpotensi mencemari lingkungan sekitar tempat produksi.

Fungsi tawas dalam pengelolaan air baku yaitu untuk mengumpulkan kotoran-kotoran pada proses penjernihan air. Tawas sebagai koagulan di dalam pengolahan air maupun limbah. Sebagai koagulan alum sulfat sangat efektif untuk mengendapkan partikel yang melayang baik dalam bentuk koloid maupun suspensi.

Hal ini juga di dukung dengan penjelasan dari bapak Benny selaku SPU Pemeliharaan IPA II Panaikang :

“Lumpur yang di hasilkan itu berupa lumpur koloid akan tetapi sampai saat ini belum ada rencana limbah tersebut untuk diolah kembali, kemarin baru ada yang mau meneliti lumpur hasil dari proses produksi dan dijadikan sebagai pupuk karena lumpur yang di hasilkan itu sangat subur”.

Sifat koloid yang digunakan untuk menjernihkan air adalah koagulasi dan

adsopri. Air sungai yang keruh banyak mengandung mengandung partikel koloid serta mungkin mengandung zat warna dan zat pencemar, misalnya detergen. Bahan yang bisa digunakan untuk penjernihan air, antara lain tawas, pasir, klorin atau kaporit, kapur tohor, dan karbon aktif. Tawas berguna untuk mengendapkan lumpur koloid sehingga dapat disaring.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar, yaitu dengan adanya keluhan-keluhan pelanggan tentang pelayanan perusahaan dan apabila musim kemarau tentunya debit air akan berkurang dan akan berdampak pada salah satu daerah yang pasti akan mengalami kekeringan.

Hal tersebut dinyatakan oleh bapak Abd Azis selaku kasie IPA I dan II :

“Dibagian diproduksi itu ada 3 K, yaitu kualitas, kuantitas dan kontinuitas misalnya di kualitas ada kekeruhan yg disebabkan kebocoran di jaringan sehingga air yang di hasilkan akan terkontaminasi atau keruh. Dari segi kuantitas itu menyangkut jumlah artinya kadang-kadang mungkin kurang lancar atau terhambat karena kurang produksi sampai tidak terpenuhi dan penyuplaiannya lambat. Kontinyu berhubungan langsung dengan kuantitas kalau kurang tidak mungkin bisa kontinyu“.

Adapun jumlah air yang dihasilkan akibat dari masalah masalah tersebut diatas yaitu hanya sekitar 450 liter/second yang seharusnya atau yang normalnya yaitu 1400 liter/second sehingga penyuplaian ke pelanggan lambat dan pasti akan berdampak pada salah satu daerah yang akan mengalami kekurangan air atau kekeringan.

Untuk menangani kendala-kendala tersebut perusahaan berusaha semaksimal mungkin untuk segera melakukan tindakan terkait dengan masalah-masalah yang

dihadapi ketika telah mendapat laporan dari para konsumen. Ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Lindrianasari (2007) yaitu aktivitas yang dapat dilakukan sehubungan dengan konservasi lingkungan diantaranya adalah konservasi terhadap sumber daya, konservasi ini dapat dilakukan dengan cara mengurangi penggunaan bahan kimia yang dapat mencemari lingkungan, mengendalikan sampah dari kegiatan produksi perusahaan, penggunaan material dari hasil daur ulang, dan lain sebagainya.

Penerapan Akuntansi Lingkungan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar

Pengakuan

Pengakuan berhubungan dengan masalah transaksi akan dicatat atau tidak kedalam sistem pencatatan, sehingga pada akhirnya transaksi tersebut akan berpengaruh pada laporan keuangan perusahaan. PDAM Kota Makassar mengakui elemen tersebut apabila biaya tersebut sudah digunakan dalam operasional perusahaan dalam mengelola lingkungan. Hal ini sesuai yang diungkapkan ibu Rahma selaku staf Akuntansi :

“Untuk alokasi biaya pengelolaan lingkungan itu diambil dari rencana biaya tahunan perusahaan dan diakui sebagai biaya apabila sudah digunakan dalam periode ini”.

Pengakuan atas biaya pengelolaan lingkungan pada PDAM Kota Makassar dialokasikan pada awal periode akuntansi yang telah di anggarkan pada periode sebelumnya dan baru diakui pada saat menerima sejumlah nilai yang telah dikeluarkan.

Pengukuran

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar dalam dalam mengukur biaya-biaya lingkungan (biaya-

biaya atas aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan) menggunakan satuan moneter rupiah berdasarkan kos yang dikeluarkan dan diambil dari realisasi anggaran periode sebelumnya, hal ini didasarkan atas pernyataan dari ibu Rahma selaku staf Akuntansi :

“PDAM Kota Makassar dalam mengukur biaya dari aktivitas-aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan, perusahaan tentunya menggunakan rupiah”

Walaupun masih belum adanya standar pengukuran mengenai biaya lingkungan, maka pengukuran biaya lingkungan ini berdasarkan kebijakan yang di terapkan oleh perusahaan

Penyajian

Penyajian berkaitan dengan masalah bagaimana suatu informasi keuangan akan disajikan dalam laporan keuangan. Biaya yang timbul dalam hal pengelolaan lingkungan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar ini disajikan bersama dengan biaya-biaya lain yang sejenis ke dalam laporan keuangan umum perusahaan. Hal tersebut dinyatakan oleh ibu Rahma selaku staf akuntansi :

“Biaya untuk aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan PDAM Kota Makassar itu dijadikan satu dalam laporan keuangan umum yaitu berupa bantuan kegiatan sosial dan sumbangan intern, dan biaya pemeliharaan pengelolaan air”.

Dan beliau juga menambahkan bahwa :

“Di PDAM Kota Makassar merupakan sebuah keharusan untuk menyajikan di laporan keuangan perusahaan karena semua biaya konservasi lingkungan merupakan bagian dari kewajiban perusahaan sehingga disajikan bersama dalam catatan atas laporan keuangan”.

Pengungkapan

Pengungkapan berkaitan dengan masalah bahwa suatu informasi keuangan atau kebijakan akuntansi perusahaan tersebut diungkapkan atau tidak. Berdasarkan hasil dokumentasi yang dilakukan selama penelitian berlangsung, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar mengungkapkan kebijakan akuntansi sehubungan dengan masalah pengelolaan lingkungan hidup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Akuntansi lingkungan ini digunakan untuk memberikan gambaran bentuk komprehensif akuntansi yang memasukkan externalities kedalam rekening perusahaan seperti informasi tenaga kerja, produk, dan pencemaran lingkungan. Dalam hal ini, pencemaran dan limbah produksi merupakan salah satu contoh dampak negatif dari operasional perusahaan yang memerlukan sistem akuntansi lingkungan sebagai kontrol terhadap tanggung jawab perusahaan sebab pengelolaan limbah yang dilakukan oleh perusahaan memerlukan pengidentifikasian, pengukuran, penyajian, pengungkapan, dan pelaporan biaya pengelolaan limbah dari hasil kegiatan operasional perusahaan.

Berdasarkan analisis diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya perusahaan sudah mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan informasi tentang pengolahan lingkungan. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa laporan biaya lingkungan tersebut masih menyatu dalam laporan keuangan umum perusahaan yang disajikan bersama-sama dengan biaya yang sejenis. Sebaiknya, perusahaan membuat laporan khusus tentang biaya lingkungan, sehingga fungsi laporan biaya lingkungan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan ekonomi dapat digunakan secara maksimal.

Penerapan PSAK Nomor 32 dan 33 dalam Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar

Laporan keuangan disusun dengan menggunakan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pembukuan dan penyusunan laporan keuangan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar berpedoman pada keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tanggal 10 Agustus tentang pedoman Akuntansi Perusahaan Air Minum (PDAM). Perusahaan telah menetapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) untuk penyusunan laporan keuangan yang di mulai pada tanggal 1 Januari 2010, oleh karena itu laporan keuangan tahun 2010 disajikan berdasarkan SAK ETAP.

Berdasarkan data yang di peroleh dari hasil dokumentasi bahwa laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar telah diaudit oleh auditor independent dari hasil laporan keuangan audited tahun 2014 yang diaudit oleh auditor independent nomor LA113: 069.ISR-S.IV.2014 tanggal 30 April 2014 KAP Mansyur Sain, CPA,CA dan rekan yang memberikan basis opini wajar dengan pengecualian karena manajemen perusahaan belum menerapkan pencatatan imbalan kerja sebagaimana yang diwajibkan dan diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas (SAK ETAP) Bab 23 tentang imbalan kerja. Menurut opini auditor, kecuali untuk Opini Wajar dengan Pengecualian, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar tanggal 31 Desember 2014, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Berikut ini analisis kualitatif perbandingan antara laporan keuangan yang disusun oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2014 dan Laporan Keuangan menurut PSAK 32 dan 33.

Tabel 1. Perbandingan Antara Laporan Keuangan PDAM dan PSAK 32 dan 33

No	INDIKATOR	MENURUT PSAK NOMOR 32 DAN 33	LAPORAN KEUANGAN PDAM KOTA MAKASSAR	ANALISIS
1	Kebijakan pelaporan keuangan	Komponen laporan keuangan: 1. Neraca 2. Laporan Laba/Rugi 3. Catatan Atas laporan Keuangan	Komponen laporan keuangan: 1. Neraca 2. Laporan laba/rugi 3. Laporan perubahan ekuitas 4. Laporan arus kas 5. Catatan atas laporan keuangan	Secara umum sama akan tetapi laporan keuangan psak 32 dan 33 tidak mencantumkan laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Kebijakan pelaporan keuangan PDAM Kota Makassar sesuai dengan PSAK 32 dan 33

2	Pendapatan dan beban	<p>A. PENDAPATAN</p> <p>Pendapatan operasional meliputi pendapatan dari penjualan hasil hutan, baik berupa kayu olahan, hasil tebangan maupun hasil hutan lainnya.</p> <p>A. BEBAN</p> <p>1. Beban usaha</p> <p>2. Beban penghentian produksi</p> <p>Beban harus diakui menggunakan dasar akrual</p>	<p>A. PENDAPATAN</p> <p>Pengakuan pendapatan</p> <p>1. Pendapatan air</p> <p>2. Pendapatan non air</p> <p>3. Pendapatan lain-lain (bunga deposito, sewa, royalti, deviden, dan penjualan lainnya)</p> <p>A. BEBAN</p> <p>1. Beban langsung usaha</p> <p>2. Beban administrasi dan umum</p> <p>3. Beban bunga dan denda pinjaman</p> <p>Beban diakui dan dicatat dalam periode terjadinya transaksi</p>	<p>Secara umum tidak ada perbedaan klasifikasi pendapatan, dan beban.</p> <p>Hanya perbedaan jenis pendapatan dan jenis beban pengakuan beban pada PSAK 32 dan 33 dan pengakuan beban pada PDAM Kota Makassar sama sama diakui dan dicatat saat terjadinya transaksi</p> <p>Penyajian pendapatan dan beban pada laporan keuangan PDAM Kota Makassar sesuai dengan PSAK 32 dan 33</p>
3	Aktiva	<p>1. Persediaan</p> <p>2. Hutan tanaman industri (HTI) dalam pengembangan</p> <p>3. Biaya ditangguhkan</p>	<p>1. Kas dan setara kas</p> <p>2. Piutang usaha</p> <p>3. Persediaan</p>	<p>Penyajian aktiva pada pada laporan keuangan PDAM Kota Makassar sudah sesuai dengan PSAK 32 dan 33</p>
4	Kewajiban dan ekuitas	<p>1. Pembangunan HTI</p> <p>2. Kewajiban perusahaan hutan</p>	<p>1. Kewajiban diestimasi</p> <p>2. Kewajiban kontinjensi</p>	<p>Secara umum tidak ada perbedaan yang signifikan, hanya terdapat perbedaan penyebutan dan jenis kewajiban</p>

Sumber : Data diolah peneliti 2016

Dasar penyajian laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar :

1. PDAM Kota Makassar adalah entitas yang memenuhi kriteria sebagai entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik

signifikan sebagaimana di definisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

2. Dengan persetujuan Direktur PDAM Kota Makassar telah memutuskan untuk menyusun laporan keuangan dengan menggunakan basis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
3. Direktur telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan PDAM Kota Makassar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
4. Laporan keuangan PDAM Kota Makassar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 tersebut telah disajikan sesuai dengan SAK ETAP.
5. Semua informasi dalam laporan keuangan PDAM Kota Makassar telah dimuat secara lengkap dan benar. Laporan keuangan PDAM Kota Makassar tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
6. Mata uang penyajian laporan keuangan PDAM Kota Makassar yang digunakan adalah Rupiah.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dibuatkan pembahasan sebagai berikut:

1. Peran Perusahaan Dalam Meningkatkan Kinerja Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar
Konsep kinerja lingkungan merujuk pada tingkat kerusakan lingkungan hidup yang di sebabkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Tingkat kerusakan lingkungan yang lebih rendah menunjukkan kinerja lingkungan perusahaan yang lebih baik. Begitu pula sebaliknya, semakin tinggi tingkat kerusakan lingkungannya maka semakin

buruk kinerja lingkungan perusahaan tersebut (Lankoski, 2000). Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh PDAM Kota Makassar yang melakukan penanaman pohon di area sumber air baku yaitu di sekitar sungai Leko Pancing dan sungai Jeneberang.

Dengan melihat aktivitas pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar, maka dapat di jelaskan bahwa aktivitas tersebut bukan tanpa mengeluarkan biaya. Aktivitas tersebut bagi PDAM Kota Makassar adalah beban yang harus di biayai oleh perusahaan, di mana beban tersebut harus dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan. Namun demikian melalui aktivitas pengelolaan lingkungan tersebut, PDAM Kota Makassar memiliki harapan bahwa lingkungan di sekitar sumber air baku akan terjaga kelestariannya, di mana pada akhirnya berdampak pada lingkungan yang sehat. Apalagi dengan melihat orientasi lingkungan jangka panjang pada perusahaan yang menyatakan bahwa aktivitas penanaman pohon tersebut juga merupakan wahana pendidikan lingkungan bagi anak-anak bangsa yang merupakan generasi mendatang. Oleh karena itu, pembiayaan yang dikeluarkan oleh perusahaan terkait dengan aktivitas pelestarian lingkungan tersebut akan mendukung kinerja lingkungan sekitar, seperti berkurangnya emisi karbon, lingkungan yang sehat dan teduh, menahan erosi, memelihara lahan resapan air, dan pendidikan lingkungan bagi masyarakat sekitar dan anak-anak.

2. Penerapan PSAK Nomor 32 dan 33 Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar
Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi bahwa laporan

keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar memiliki kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

PSAK No 32 memberikan pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan akuntansi kehutanan. Manfaat dan tujuan akuntansi kehutanan sesuai dengan PSAK No 32 adalah terwujudnya pembukuan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan perusahaan perusahaan hutan, seperti pemegang HPH/HPHTI, berdasarkan asas keterbukaan, sehingga dapat di pergunakan oleh berbagai pihak ekstern seperti instansi yang berwenang dan masyarakat.

PSAK No 33 ini wajib digunakan dalam penyajian laporan keuangan untuk pihak eksternal bagi setiap perusahaan yang bergerak dalam industri pertambangan umum termasuk kontraktor dalam rangka Kontrak Karya dan/atau Kontrak Kerjasama di bidang pertambangan umum. Dengan adanya Pernyataan ini, maka baik penyusun maupun pengguna laporan keuangan wajib mengacu kepada standar akuntansi yang sama. Apabila perlakuan akuntansi bersifat umum, maka harus tetap mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan. PSAK ini juga mengatur tentang Pengelolaan Lingkungan hidup terkait dengan adanya kegiatan penambangan.

Secara keseluruhan pelaporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar sudah sesuai dengan PSAK 32 dan 33, akan tetapi, pelaporan keuangan PSAK 32 dan 33 tidak memasukkan laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Pada PSAK 32,

penyajian aktiva dan kewajiban dalam neraca dikelompokkan menurut urutan lancar dan tidak lancar. Aktiva diklasifikasikan menurut urutan likuiditas dan kewajiban diklasifikasikan menurut urutan jatuh tempo. Ini sudah sesuai dengan penyajian aktiva dan kewajiban pada laporan posisi keuangan PDAM Kota Makassar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar sudah mengeluarkan biaya-biaya lingkungan dalam pencatatan akuntansinya. Biaya pengelolaan lingkungan yang dikeluarkan oleh PDAM Kota Makassar dicatat dalam laporan keuangan perusahaan yaitu pada catatan atas laporan keuangan sebagai biaya yang masih harus dibayar dan beban langsung usaha.
2. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar membentuk bagian pengolahan limbah lumpur sebagai bagian dari stuktur organisasi di lingkungan PDAM yang bertugas mengolah pembuangan lumpur, menjadwalkan pembuangan lumpur dengan mempertimbangkan kondisi pasang dan surut, serta memanfaatkan lumpur PDAM sebagai bahan campuran pembuatan batako dan untuk perkebunan. Sehingga di jamin tidak ada limbah yang dihasilkan perusahaan yang mencemari lingkungan.
3. Peran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar dalam upaya peningkatan kinerja lingkungan yaitu dengan melakukan penanaman pohon untuk penghijauan di area sumber air baku yaitu di sekitar sungai Leko Pancing.
4. Informasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup dilaporkan kedalam Catatan Atas Laporan Keuangan perusahaan sudah sesuai, karena mengacu pada PSAK Nomor 32 tentang Akuntansi

Kehutanan dan PSAK Nomor 33 tentang Akuntansi Pertambangan Umum.

DAFTAR RUJUKAN

- Alamendah. 2011. *Daftar Kota Peraih Piala Adipura 2010*. <http://alamendah.org/2011/06/07/daftar-kota-penerima-pialaadipura-2011/>
- Burhany, D. I. 2014. *Pengaruh Implementasi Akuntansi Lingkungan Terhadap Kinerja Lingkungan dan Pengungkapan Informasi Lingkungan (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Umum yang Mengikuti PROPER Periode 2008-2009)*. Indonesian Journal of Economics and Business, 1(2), 257-270.
- Tony Djogo. 2006. *Akuntansi Lingkungan*. Makalah 7 Pebruari 2006.
- Ja'far, M. S Dan Dista Amalia Arifah. 2006. *Pengaruh Dorongan Manajemen Lingkungan, Manajemen Lingkungan Proaktif, dan Kinerja Lingkungan Terhadap Public Environmental Reporting*.
- Putra, W. E. 2008. *Penerapan Akuntansi Lingkungan Dan Akuntansi Manajemen Lingkungan Sebagai Komponen Dasar Perencanaan Strategi Bisnis*. Jurnal Percikan, 94